



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



LAPORAN KINERJA

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



20
21



Copyright
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
2021

Penyusun

Kaisar Julizar, S.Sos
Siska Lismayanti, S.Pd., M.Si.
Mega Birlian Adhitya, S.E, M.M.
Alfan Sory, S.Kom.
Hasti Kusumawati, S.E.
Bonifatius Galih K., S.Kom

Pereviu

Andry Rihardika, S. Kom, M.M.
Irsyad Zamjani, Ph.D.
Nur Berlian Venus Ali, M.SE
Damardjati Kun Marjanto, S.Sos.
Lukman Solihin, S.Ant., M.A.

Desain dan Tata Letak

Putu Sasri Sthiti Dhaneswara, S.Sn



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Laporan Kinerja

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya, Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud) yang melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 berubah menjadi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PSKP, BSKAP, Kemendikbudristek), dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala PSKP dalam membantu Kepala BSKAP menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

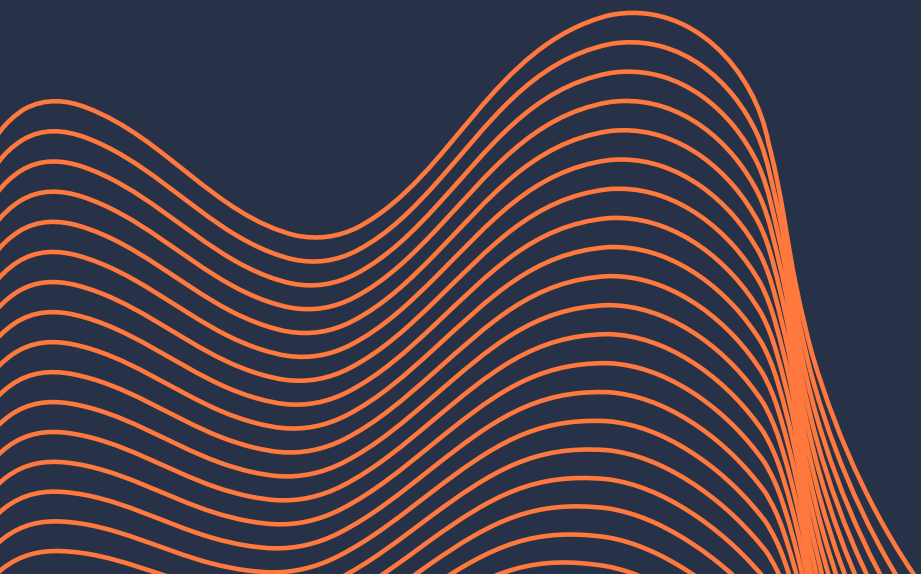
Laporan Kinerja ini menyajikan informasi target dan capaian kinerja PSKP pada tahun 2021 dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020–2024. Pada tahun 2021, PSKP memiliki dua Sasaran Kegiatan yang diukur melalui lima Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar acuan penilaian untuk mengevaluasi capaian kinerja yang akuntabel. Selain digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini juga digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh PSKP sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini baik dalam bentuk kontribusi data, penulisan laporan, maupun bentuk lainnya.

Plt. Kepala Pusat,
Irsyad Zamjani, Ph.D

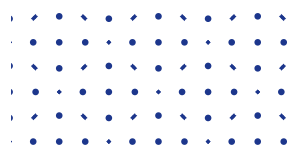


KEMEN
BAD
ANDAR
DIDIKAS
R, RISET, DAN
KULIAH, KEM, ASESMEN PEND
KEMERDEKAAN PENDIDIKAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
IKK #1.1	2
IKK #1.2	3
IKK #1.3	3
IKK #2.1	3
IKK #2.2	3
Kinerja Realisasi Anggaran	4
Hambatan/Kendala	4
Langkah Antisipasi	
BAB I PENDAHULUAN	7
Gambaran Umum	8
Dasar Hukum	8
Tugas dan Fungsi	9
Struktur Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
Visi dan Misi	18
Tujuan dan Sasaran Strategis	18
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
Capaian Kinerja Puslitjak	24
IKK #1.1 Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	25
IKK #1.2 Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan	30
IKK #1.3 Jumlah Hasil Penjaminan Mutu	34
IKK #2.1 Predikat SAKIP Satker	36
IKK #2.2 Nilai Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan RKA-K/L Satker	37
Transisi ke Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	39
Penyusunan SNP	39
Evaluasi Program Sekolah Penggerak	41
Evaluasi Sistem Pendidikan	44
Realisasi Anggaran	45
Efisiensi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	49
Kesimpulan	50
Rekomendasi	52
Lampiran	53



IKHTISAR EKSEKUTIF

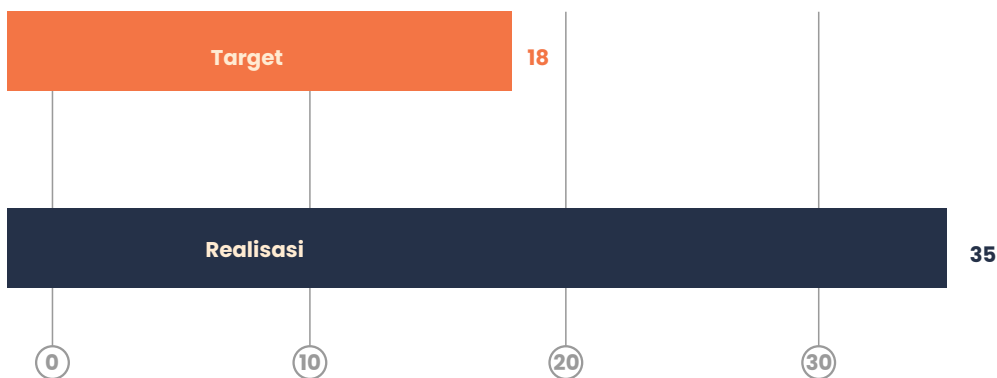
Laporan Kinerja Pusat Penelitian Kebijakan/ Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran dengan lima indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Secara umum, ringkasan capaian indikator kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan #1:

Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.

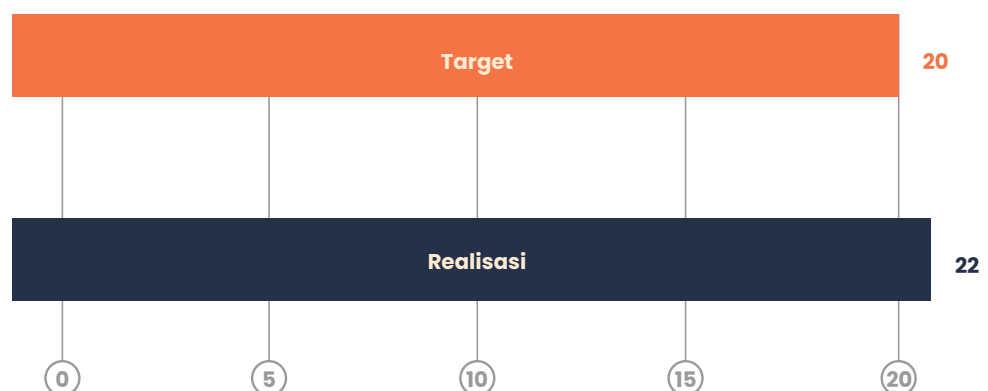
IKK #1.1 *Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan*

Capaian Tahun 2021



IKK #1.2 *Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan*

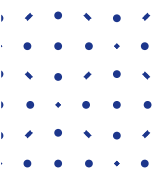
Capaian Tahun 2021



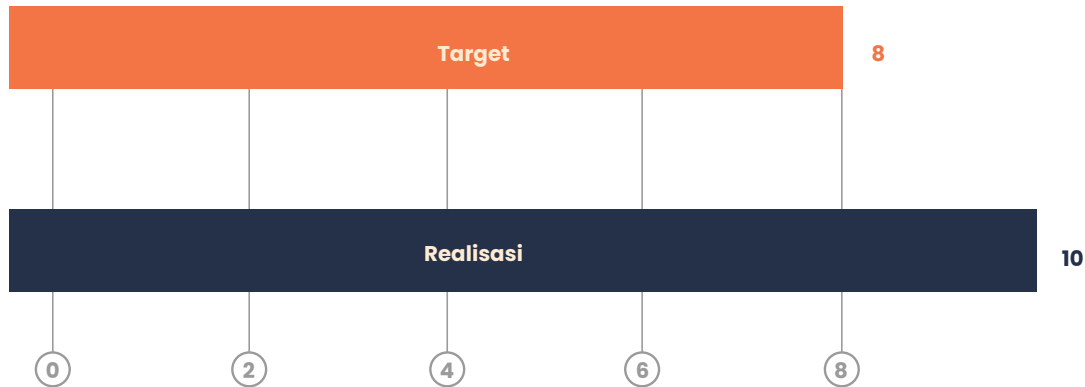
IKK

#1.3

Jumlah hasil
penjaminan
Mutu



Capaian Tahun 2021



Sasaran Kegiatan #2:

Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan.

IKK

#2.1

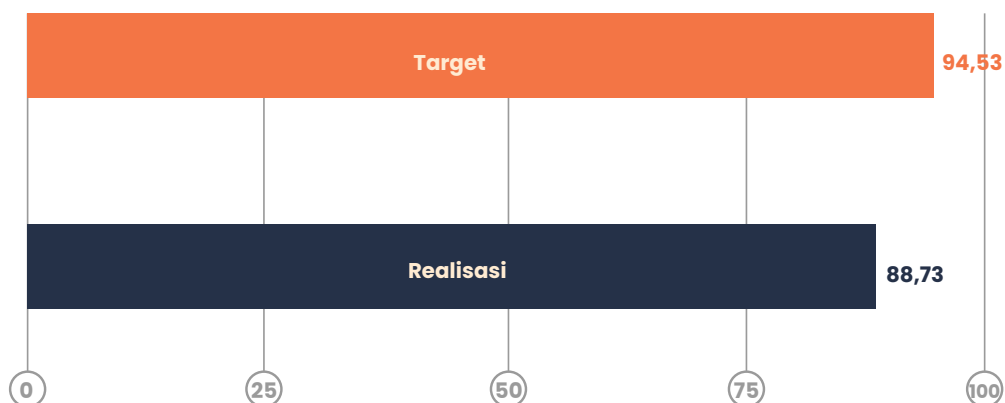
Capaian Tahun 2021

Target	Realisasi
A	A

IKK

#2.2

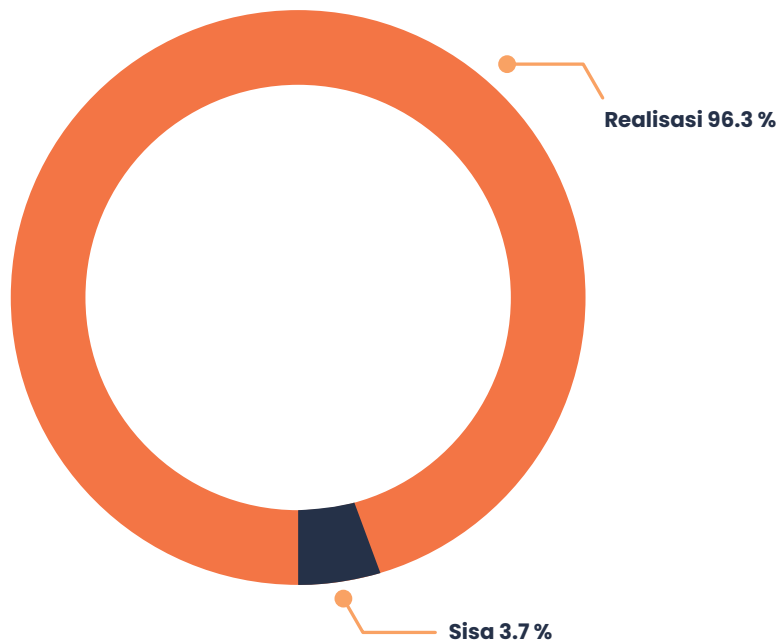
Capaian Tahun 2021



KINERJA REALISASI ANGGARAN

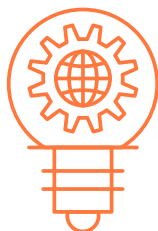
Pagu
48,500,754,000

Realisasi
46,711,585,640



Hambatan/ Kendala

- Pemberlakuan PPKM sejak awal Juli s.d. akhir bulan Agustus, menyebabkan kegiatan dan penyerapan anggaran tertunda pelaksanaannya.
- Efisiensi anggaran/refocusing menyebabkan adanya pengalihan belanja anggaran dari semula untuk program/kegiatan menjadi belanja penanganan Covid-19, dan tidak bisa dialihkan kembali ke belanja program/kegiatan.



Langkah Antisipasi

- Penjadwalan kegiatan secara rinci dengan mekanisme kegiatan yang dilakukan secara paralel dan berkolaborasi dengan pihak eksternal.
- Revisi DIPA untuk pemenuhan refocusing anggaran dan penyesuaian pola kegiatan untuk memenuhi kebijakan PPKM.



SEMINAR HASIL

PENELITIAN TAHUN 2019

Tantangan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan di Era Digital



KEMEN
DIDIKAS
R, RISET, DAN
BAD
AR, KU
ASESMEN PEND
ANDAR
KE
AN PENDIDIK





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak)/Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) merupakan salah satu Pusat pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BSKAP Kemendikbudristek) yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, namun melalui Permendikburistek RI Nomor 28 tahun 2021 diubah menjadi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, dan analisis kebijakan pendidikan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- D. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- H. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud) Tahun 2020–2024.

3. Tugas dan Fungsi

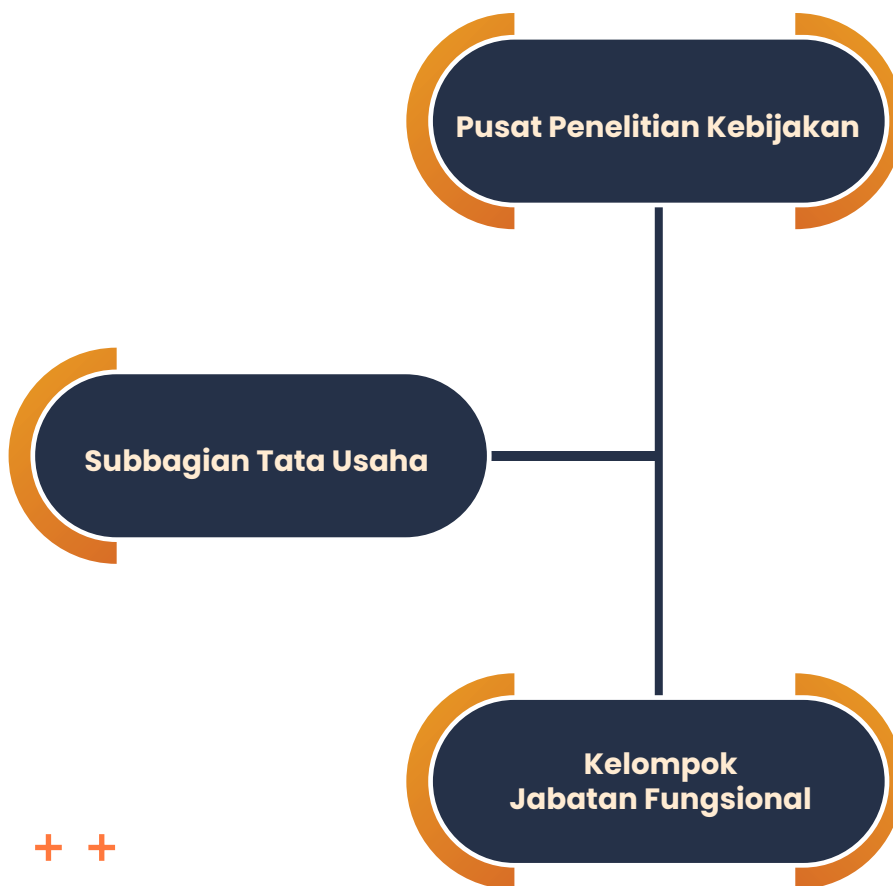
Pusat Penelitian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Pusat.

Pusat Penelitian Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

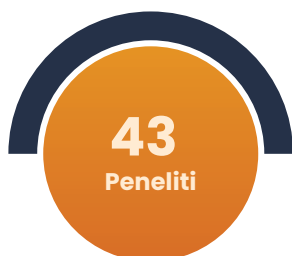
- A. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- B. Pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- C. Pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian kebijakan di
- D. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- E. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian kebijakan di
- F. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- G. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
- H. kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
- I. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.



4. Struktur Organisasi



Profil Sumber Daya Manusia





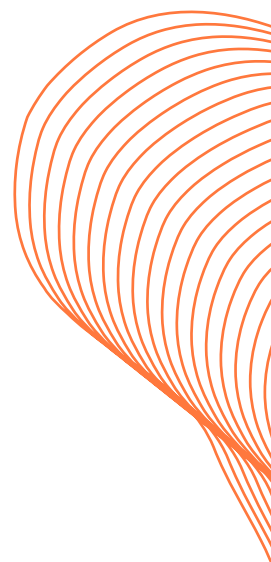
5. Isu Strategis

Dengan berlanjutnya pandemi COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh maka ketertinggalan capaian pembelajaran menjadi isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu Puslitjak merespon isu tersebut dengan melakukan:

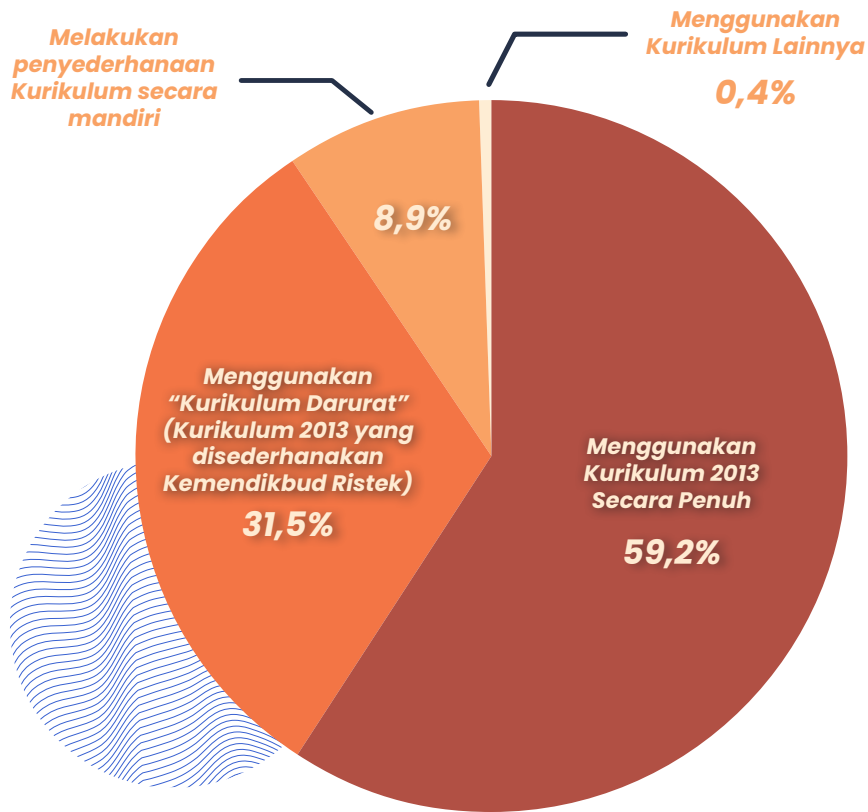
- a. Kajian evaluasi pembelajaran di masa pandemi.
Kajian evaluasi capaian pembelajaran
- b. (*learning outcome*) siswa pada masa pandemi, dan
Kajian evaluasi implementasi kurikulum
- c. darurat pada satuan pendidikan selama masa pandemi

Hasil survei Puslitjak pada bulan Mei 2021 menunjukkan sebagian besar sekolah (51,4%) masih melakukan belajar dari rumah secara penuh. Sementara itu, 37,2% sekolah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dan sisanya (11,3%) melakukan PTM secara penuh. Jika dicermati lebih jauh, sekolah-sekolah di daerah tertinggal lebih banyak yang melakukan PTM, baik secara terbatas (61,4%) maupun penuh (18,2%). Sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang masih melakukan BDR hanya tersisa 20,4% sekolah. Kendala akses pada jaringan internet yang berkualitas masih menjadi masalah utama.

Dari hasil survei yang dilakukan Puslitjak bersama INOVASI kepada 3.391 siswa di 7 kabupaten/kota dapat diketahui bahwa pandemi menyebabkan terjadinya *learning loss* yang cukup mengkhawatirkan. Jika disetarakan dengan lama belajar, besaran *learning loss* ini setara dengan 5-6 bulan belajar.

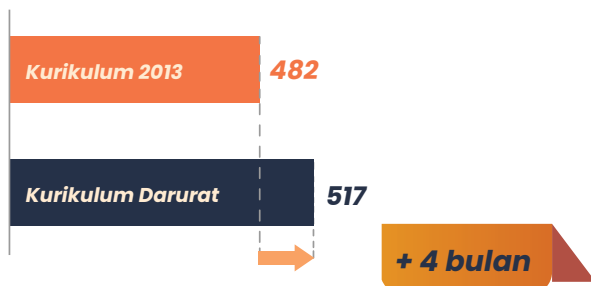


Persentase Satuan Pendidikan Menurut Kurikulum Yang Digunakan



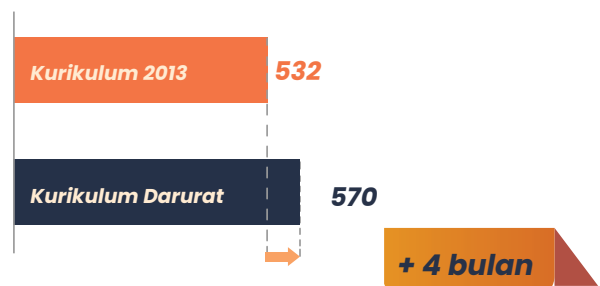
Perbandingan Hasil Belajar Literasi dan Numerasi Siswa Menurut Kurikulum yang Digunakan

Selisih Skor Numerasi



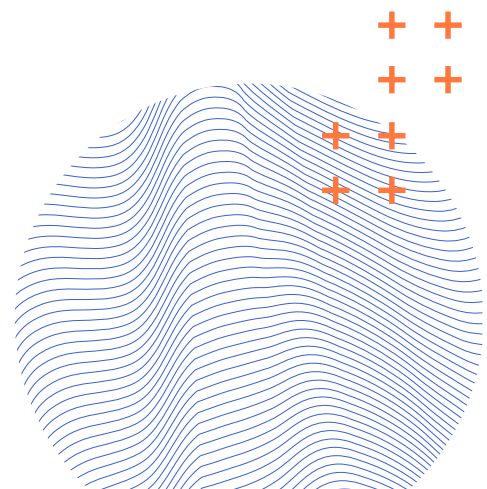
++
++
++
++

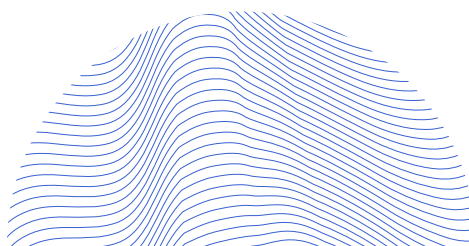
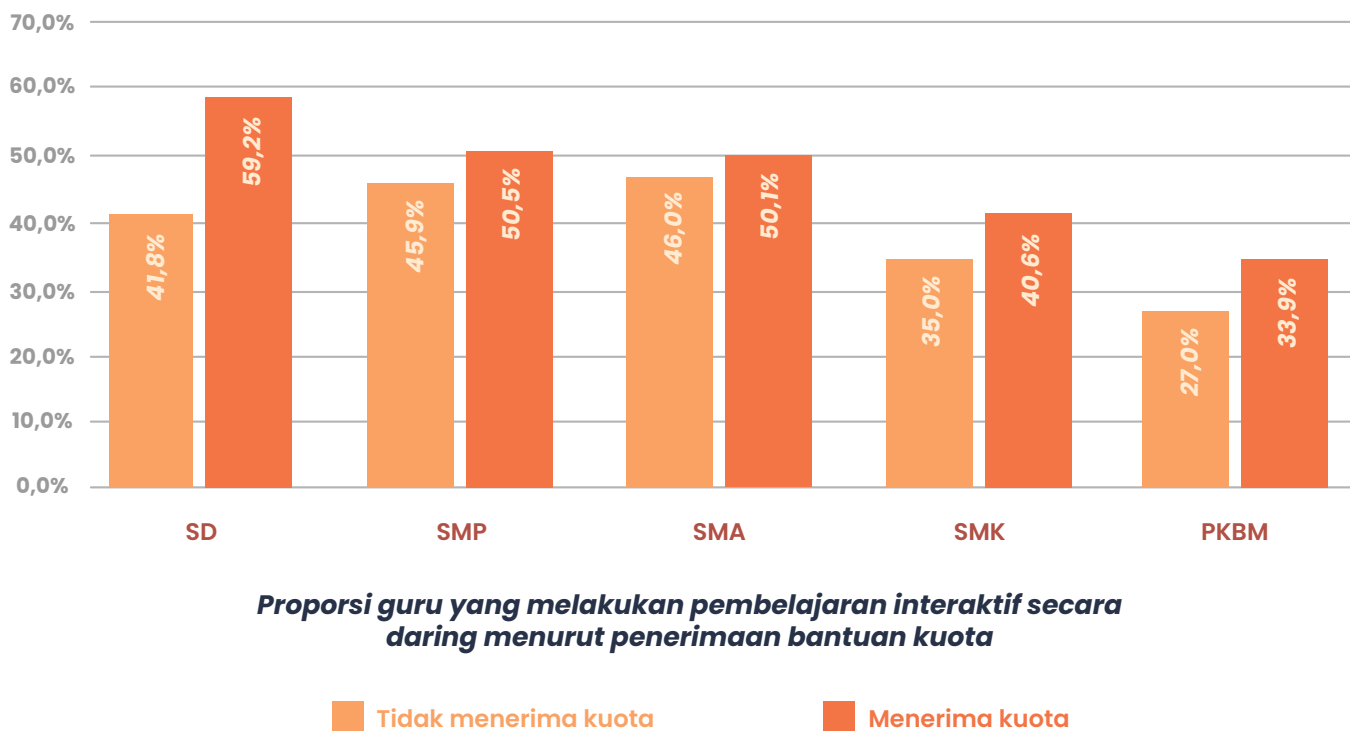
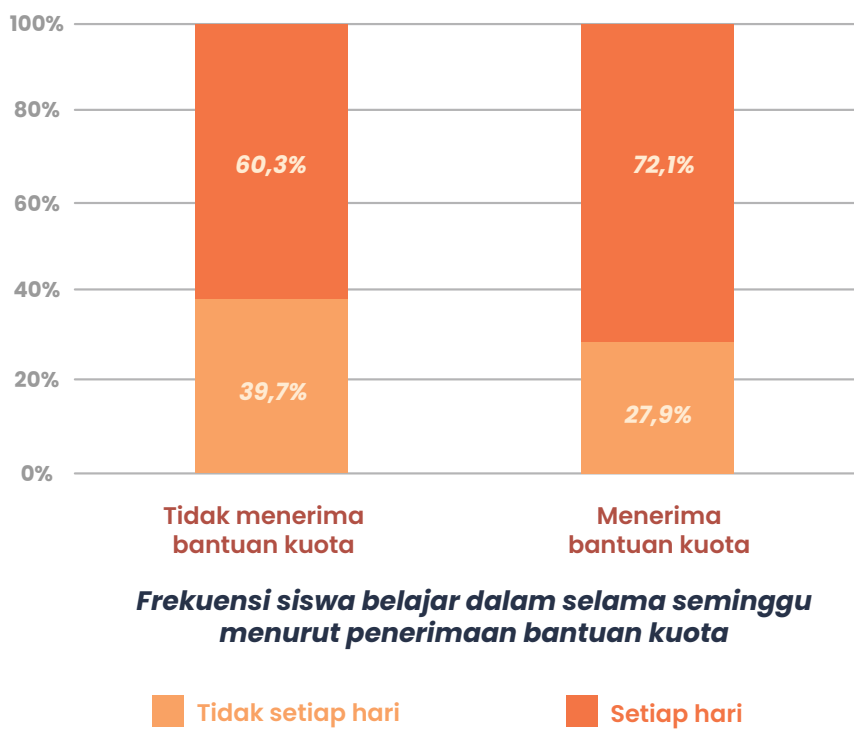
Selisih Skor Literasi



Kebijakan-kebijakan Kemendikbud untuk membantu guru dan siswa melakukan pembelajaran selama pandemi sejauh ini cukup optimal dimanfaatkan. Hasil survei Puslitjak mendapatkan bahwa kurikulum darurat, misalnya, telah digunakan oleh 31,5% sekolah di Indonesia. Dari hasil studi Puslitjak bersama INOVASI ditemukan bahwa siswa di sekolah yang menggunakan kurikulum darurat memiliki hasil belajar literasi dan numerasi yg lebih baik dibandingkan siswa di sekolah pengguna kurikulum 2013 penuh.

Program Kemendikbudristek yang lain seperti bantuan kuota internet juga membantu siswa dan guru meningkatkan intensitas dan kualitas pembelajaran. Hasil studi Puslitjak menunjukkan bahwa 72,1% siswa penerima bantuan kuota dapat belajar setiap hari, proporsi ini lebih banyak dibandingkan siswa yang tidak menerima bantuan kuota (60,3%). Demikian halnya proporsi guru SD penerima kuota yang melakukan pembelajaran interaktif secara daring lebih banyak (59,2%) dibandingkan yang belum menerima kuota (41,8%).



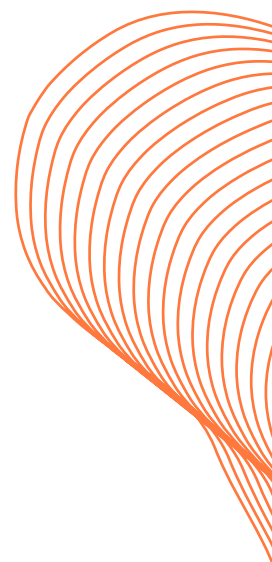


Selain daripada itu, untuk melestarikan salah satu warisan budaya di Indonesia, Puslitjak melaksanakan kajian dengan tema merawat jalur rempah sebagai warisan budaya. Kajian yang dilaksanakan yaitu:

- 1). kajian rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pantai timur sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya tahun 1623 - 1920 an,
- 2). kajian konglomerasi dan kontestasi: merekonstruksi jalur rempah dan implikasinya di pantai utara jawa,
- 3). kajian peran jawa timur dalam jaringan jalur rempah sejak periode kuno sampai abad ke-18,
- 4). kajian inovasi pembelajaran sejarah jalur rempah nusantara berbasis *augmented reality* (AR) untuk menguatkan karakter nasionalisme dan keterampilan abad 21 dan kajian *history bytes* Pembelajaran sejarah lokal: studi kasus Barus, Sumatera Utara.

Dari kajian/penelitian mengenai Jalur Rempah didapatkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- 1). Perlunya kajian dan penelitian jalur rempah yang secara substantif untuk mendukung pengusulan jalur rempah ke UNESCO dan penguatan kurikulum berbasiskan penelitian yang mendalam untuk pembelajaran sejarah.
- 2). Model modul pembelajaran lokal seperti yang dilakukan di Barus sudah selayaknya diterapkan juga di daerah lain di Indonesia dengan mengedepankan sejarah lokal masing-masing daerah.
- 3). Perlu adanya penambahan materi jalur rempah dalam pembelajaran sejarah.
- 4). Perlu adanya inovasi dalam proses pembelajaran sejarah supaya tidak monoton dalam proses pembelajaran.
- 5). Perlu adanya inovasi pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan karakter nasionalisme siswa dan meningkatkan keterampilan abad 21.





KEMEN
DIDIKAS
R, RISET, DAN
BAD
AR, KU
ASESMEN PEND
ANDAR
KE
AN PENDIDIK





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi:

Visi Pusat Penelitian kebijakan adalah menjadi lembaga penelitian yang kredibel dan profesional, yang menjadi rujukan penting dalam pengembangan pengetahuan dan kebijakan baik secara nasional maupun Internasional.

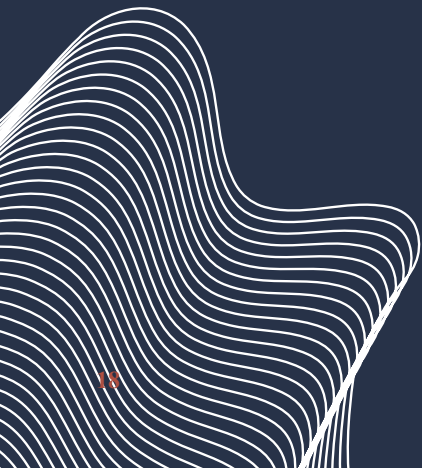
Misi:

- A. Meningkatkan kualitas hasil penelitian sebagai acuan dalam kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- B. Mengembangkan konsep dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang relevan dengan dinamika perubahan.
- C. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.
- D. Meningkatkan kualitas sumber daya dalam mendukung penelitian dan pengembangan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis: "Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan."

Sasaran Strategis: "Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan."



3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

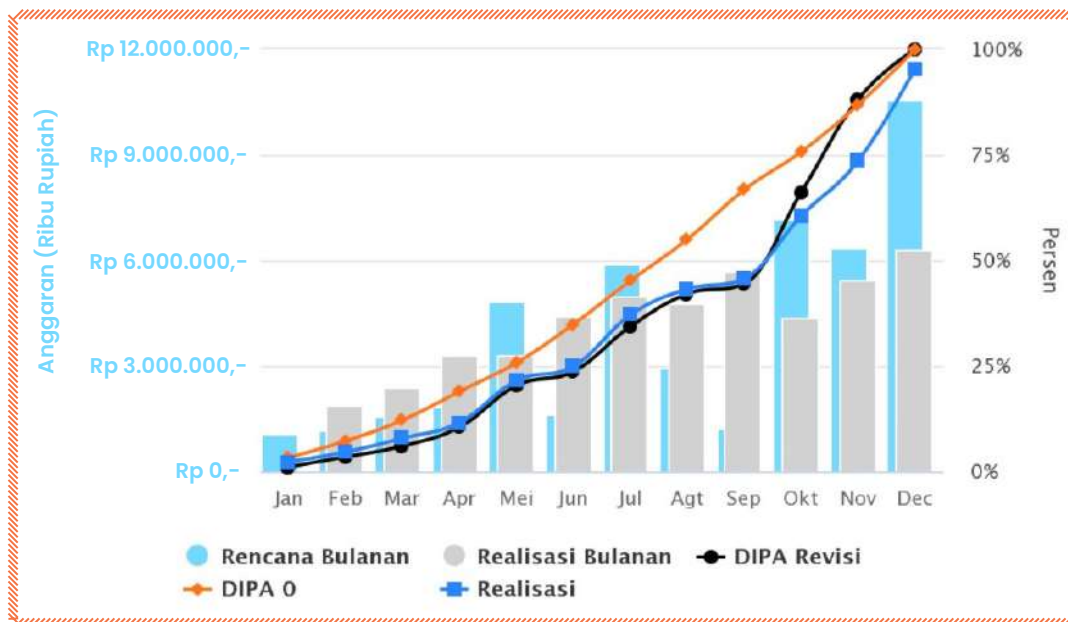
Sasaran Kinerja (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target PK Awal	Target PK Revisi
Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	20 Laporan Penelitian	18 Laporan Penelitian
	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	20 Laporan Isu Aktual	20 Laporan Isu Aktual
	Jumlah hasil penjaminan mutu	8 Dokumen	8 Dokumen
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	Predikat SAKIP Satker	A	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker	94.53	94.53

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Kajian Isu Aktual	4,469,630,000
2	Hasil Penelitian Kebijakan Terfasilitasi dan Terdiseminasi	7,064,742,000
3	Hasil Penelitian	17,969,664,000
4	Layanan Perkantoran	17,031,257,000
5	Layanan Umum	1,603,921,000
6	Layanan Sarana Internal	361,540,000

Jumlah alokasi anggaran Kegiatan Penelitian pada Pusat Penelitian Kebijakan adalah sebesar **Rp 48,500,754,000** yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar **Rp 29,504,036,000** dan untuk kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar **Rp 18,996,718,000**.

Berikut ini adalah grafik rencana dan realisasi penyerapan anggaran Pusat Penelitian Kebijakan tahun anggaran 2021.

Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran T.A 2021

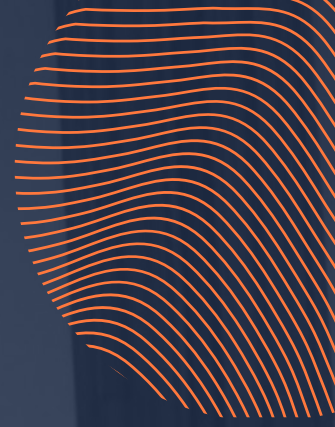






KEMEN
DIDIKAS
R, RISET, DAN
BAD
AR, KU
ASESMEN PEND
ANDAR
KE
AN PENDIDIK



A group of people, mostly men, are standing in a meeting room. Some are raising their hands, suggesting an interactive session or a presentation. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'BAB III AKUNTABILITAS KINERJA' is centered over the image in a bold, orange font.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Puslitjak

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, Pusat Penelitian Kebijakan menetapkan dua Sasaran Kegiatan (SK) dengan tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Kegiatan #1 dan dua Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan#2 sebagai ukuran keberhasilan.

Capaian Pusat Penelitian Kebijakan selama Tahun Anggaran 2021 dapat menyelesaikan empat Indikator Kinerja Kegiatan. Dalam menyelesaikan Sasaran Kegiatan #1 berupa "Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan" dilaksanakan melalui Tiga Indikator Kinerja kegiatan yang diselesaikan dengan capaian lebih dari 100% dari target yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan hasil-hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan #2 berupa "Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan" diukur melalui Indikator Kinerja "Predikat SAKIP Satker" dan "Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker". Kedua Indikator Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan program dan anggaran pusat

Sasaran Kegiatan #1:

Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

IKK #1.1

Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan

IKK #1.2

Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan

IKK #1.3

Jumlah Hasil Penjaminan Mutu

Sasaran Kegiatan #2:

Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

IKK #2.1

Predikat SAKIP Satker

IKK #2.1

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker

Ketercapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan selama tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut.

IKK #1.1 Jumlah Hasil Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%			
36 Laporan Penelitian	18 Laporan Penelitian	35 Laporan Penelitian	194,4%	20 Laporan Penelitian	105 Laporan Penelitian	67,6%

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini pada tahun 2021 adalah sebesar 194,4%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 18 laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dihasilkan dari 35 kegiatan penelitian yang tidak hanya dilaksanakan oleh para peneliti, perekayasa, dan JFU Puslitjak, namun juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan peneliti dari lembaga lain yaitu perguruan tinggi. Keberhasilan pencapaian target terjadi karena adanya perencanaan matang melalui penyusunan desain, pemilihan permasalahan, kesesuaian metode, dan waktu pelaksanaan.

Capaian IKK ini didukung oleh 35 kegiatan penelitian. Berikut ini tabel yang menyajikan 35 judul kegiatan penelitian.

No.	Judul Penelitian
1	Evaluasi Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) Siswa pada Masa Pandemi
2	Evaluasi Implementasi Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan Selama Masa Pandemi
3	Strategi Penguatan Pembelajaran Kombinasi (Blended Learning) Sebagai Pendekatan Belajar di Masa Kenormalan Baru
4	Pengembangan Modul Pembelajaran Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus
5	Pembelajaran Kemampuan Berpikir Komputasional Bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar
6	Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan
7	Peningkatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
8	Pengelolaan Guru Bukan PNS pada Jenjang Pendidikan Dasar di Daerah

9	Peningkatan Partisipasi PAUD dalam Mendukung “Wajib Belajar” 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar
10	Dampak Program Indonesia Pintar terhadap Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
11	Studi Relevansi Regulasi-regulasi Bidang Pendidikan dengan Dinamika Perubahan Kontemporer
12	Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru Produktif melalui Kerjasama dengan Industri dan Dunia Kerja
13	Evaluasi Program Revitalisasi SMK: Pemenuhan dan Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan
14	Pemetaan Kesenjangan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia dan Strategi Mengatasinya
15	Kajian Dampak Sertifikasi Dosen terhadap Kinerja Dosen
16	Pelajar Pancasila: Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya
17	Nasionalisme dalam Tiga Peristiwa: Studi Efektivitas Pameran Tetap Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Naskah Proklamasi dalam Membangun Kesadaran Kebangsaan
18	Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah
19	Model Pemanfaatan Museum dan Taman Budaya oleh Satuan Pendidikan dan Masyarakat
20	Kajian Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengembangan Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat
21	Pengembangan Desa Pemajuan Kebudayaan: Penguatan Ekosistem Kebudayaan melalui Pendekatan Partisipatif untuk Kesejahteraan Masyarakat
22	Penguatan Kesantunan Digital di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa sebagai Dampak Bertumbuhnya Media Digital
23	Pemetaan Karya Seni Rupa Kontemporer Indonesia Periode 2000-2021
24	Studi Evaluasi Program Sekolah Penggerak
25	Evaluasi Baseline Dampak Program Sekolah Penggerak Pendidikan Anak Usia Dini
26	Penyusunan Indeks Aktivitas Literasi Membaca
27	Analisis Kompetensi Literasi Digital Guru dan Strategi Adaptasi Teknologi pada Pembelajaran Daring di Daerah 3T
28	Strategi Adaptasi Bangunan Sekolah untuk Mendukung Pembelajaran Pasca Pandemi COVID-19
29	Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional Berbasis Augmented Reality
30	Strategi Meningkatkan Kesiapkerjaan Lulusan Perguruan Tinggi Melalui Penyiapan Pengalaman Kerja Transisional
31	Strategi Implementasi SMK Berstatus Badan Layanan Umum Daerah untuk Mendukung Program SMK Pusat Keunggulan
32	Penguatan Wawasan Budaya Rempah melalui Jalur Geowisata di Belitong UNESCO Global Geopark
33	Merawat Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya
34	Menciptakan Habitus di Sekolah yang Mampu Mendorong Karakter dan Budaya Toleran Siswa: Belajar dari Best-Practices di Indonesia
35	Model Pengelolaan Capaian Kinerja Sekolah Berbasis IOT (Internet of Thing) untuk Peningkatan Mutu dan Kinerja Sekolah

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Puslitjak berdasarkan pada permasalahan aktual dan kebutuhan strategis. Selain itu, Puslitjak berusaha untuk melakukan penelitian yang responsif, akomodatif, dan solutif terhadap dinamika tantangan dan kebutuhan saat ini dan ke depan.



Hambatan/ Kendala

- *Pemberlakuan PPKM sejak awal Juli s.d. akhir bulan Agustus, menyebabkan kegiatan dan penyerapan anggaran tertunda pelaksanaannya.*
- *Efisiensi anggaran/refocusing untuk belanja penanganan Covid-19 menyebabkan belanja program/kegiatan perlu menyesuaikan dengan kebijakan PPKM dan tidak bisa dialihkan kembali.*



Langkah Antisipasi

- *Penjadwalan kegiatan secara rinci melalui mekanisme kegiatan yang dilakukan secara paralel dan berkolaborasi dengan pihak eksternal*
- *Revisi DIPA untuk pemenuhan refocusing anggaran dan penyesuaian pola kegiatan sebagai dampak kebijakan PPKM.*

BEBERAPA REKOMENDASI HASIL PENELITIAN



Dari seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitjak baik secara internal maupun kolaborasi dengan lembaga lain, dapat dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan Tahun 2021 yang telah dimanfaatkan sebagai berikut:

- 1). Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang secara eksplisit mendorong satuan Pendidikan untuk mengadopsi kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial seperti literasi dan numerasi (*disampaikan dalam paparan kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran oleh Kepala BSKAP Kepada Komisi X DPR RI pada tanggal 20 November 2021*).
- 2). Dalam pelaksanaan Kurikulum darurat, ada beberapa rekomendasi yang bisa dijalankan, seperti: dinas Pendidikan dan lembaga non pemerintah dalam sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan implementasi kurikulum darurat, dilakukannya asesmen diagnostik pada siswa, pengembangan KTSP dan silabus berdasarkan kurikulum di masa pandemi, diperlukannya kreativitas dalam penyampaian KD esensial di luar kurikulum darurat, pengurangan KD pada kurikulum kondisi khusus membutuhkan silabus berisi pemetaan KI/ KD berdasarkan pembelajaran PTMT dan PJJ, dan pembelajaran *life skill* kebiasaan baru di masa pandemi (*disampaikan dalam paparan kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran oleh Kepala BSKAP Kepada Komisi X DPR RI pada tanggal 20 November 2021*).
- 3). Pelaksanaan strategi penguatan pembelajaran kombinasi (*blended-learning*) dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan kapasitas sekolah ataupun guru dalam pengelolaan pembelajaran yang adaptif, mendorong upaya pengembangan kompetensi khususnya dalam pengelolaan kelas berbasis pemetaan kebutuhan guru, dan Memperkuat perangkat kebijakan yang telah ada saat ini untuk mendorong pelaksanaan *blended-learning* di sekolah (*disampaikan sebagai bahan perbaikan pembelajaran kepada Pusdatin, PAUD Dasmen, GTK dan Dinas Pendidikan*).
- 4). Rekomendasi bantuan kuota internet dan implikasinya bagi pengalaman belajar mengajar adalah Kemendikbud perlu membuat skema bantuan kuota internet yang lebih fleksibel sehingga kuota yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima sesuai kebutuhan. Skema bantuan kuota sebaiknya bersifat tunggal dan dapat digunakan mengakses semua konten pembelajaran yang

dibutuhkan. Meskipun demikian, skema bantuan ini perlu membatasi akses pada laman dan aplikasi yang dapat mengganggu aktivitas dan konsentrasi belajar seperti media sosial tertentu, game online, dan laman yang memuat konten terlarang (termasuk yang telah diblokir oleh Kemenkominfo) (*disampaikan kepada Pusdatin Kemendikbud untuk perbaikan program kuota belajar Kemendikbud*).

- 5). Rekomendasi untuk pengelolaan Guru bukan PNS adalah dengan melakukan perencanaan kebutuhan guru oleh dinas pendidikan berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh sekolah, penerapan afirmasi yang memberikan rasa keadilan pada perekrutan ASN P3K oleh pemerintah pusat, memberikan kemudahan kepada Guru bukan PNS untuk mengikuti PPG, Proses rekrutmen Guru baru dilakukan oleh dinas pendidikan, kepala sekolah memberikan kesempatan yang adil kepada Guru PNS dan Guru bukan PNS, dan memperhatikan kesejahteraan Guru bukan PNS dari kelompok guru honor sekolah (*disampaikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan GBPNS dan PPPK kepada GTK dan Daerah*).
- 6). Peningkatan kompetensi guru produktif SMK dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama serius dan intensif antara SMK dan mitra industri, memperkenalkan budaya kerja dengan konsep 5-R dan K3, *basic mentality* sejak guru memulai karir, pembebas tugas guru pada saat melakukan magang (*dimanfaatkan untuk penyusunan standar kompetensi esensial pendidikan vokasi oleh BSNP*).
- 7). Peningkatan kinerja dosen melalui kebijakan sertifikasi dosen dapat dilakukan dengan membuat mekanisme penguatan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan bagi dosen bersertifikat, dan melakukan integrasi antara laporan beban kerja dosen dengan pemenuhan angka kredit dosen sesuai jabatan fungsional (*digunakan sebagai referensi dalam naskah akademik revisi undang-undang Sisdiknas*).

IKK #1.2 Jumlah Hasil Kajian Isu Aktual Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%			
18 Laporan Penelitian	20 Laporan Penelitian	22 Laporan Penelitian	110%	20 Laporan Penelitian	105 Laporan Penelitian	38,1%

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini pada tahun 2021 adalah sebesar 110%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 20 laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dihasilkan dari 22 kegiatan kajian isu aktual yang dilaksanakan oleh para peneliti, perekayasa, dan JFU Puslitjak. Capaian IKK ini didukung oleh kegiatan kajian isu aktual melalui 5 topik kajian.

Capaian IKK ini didukung oleh 22 kegiatan kajian. Berikut ini tabel yang menyajikan 22 judul kegiatan kajian isu aktual.

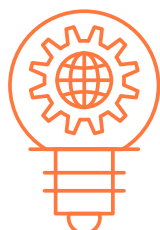
No.	Judul Penelitian
1	Evaluasi Penyerapan Dana BOS
2	Evaluasi Program SMK Pusat Keunggulan
3	Analisis Kelayakan Gaji dan Tunjangan Guru
4	Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
5	Pelaksanaan Asesmen Nasional di Daerah dan Satuan Pendidikan
6	Evaluasi Program Link and Match SMK oleh Kemenperin 2017-2020
7	Capaian Pembelajaran Produktif di SMK Selama Belajar dari Rumah
8	Implementasi Kebijakan dan Praktik Non Diskriminatif pada Satuan Pendidikan
9	Pelaksanaan Sistem Sekolah Inklusi
10	Analisis Unit Cost BOP Kesetaraan
11	Evaluasi Pembelajaran di Masa Pandemi
12	Evaluasi Guru Penggerak

13	Penetapan Candi Borobudur sebagai Destinasi Wisata Superprioritas dan Tempat Ibadah Agama Buddha Dunia dalam Perspektif Perlindungan Budaya
14	Tindaklanjut Pelestarian Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda yang Terdaftar dalam ICH UNESCO
15	Evaluasi Program Belajar dari Rumah Melalui TVRI
16	Dampak Pandemi terhadap Transisi Lulusan Pendidikan Vokasi ke Dunia Kerja (Analisis Sakernas 2020)
17	Efektivitas Pelatihan Guru secara Daring
18	Analisis Jenis Pekerjaan dan Keterampilan pada Era Revolusi Industri 4.0
19	Analisis Regulasi Turunan UU No.5/2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
20	Strategi Kebijakan Merdeka Belajar: Mendorong Penguatan Penelitian dan Inovasi di Perguruan Tinggi
21	Kajian Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Luaran Pendidikan Vokasi
22	Kajian Kualitas Pembelajaran Siswa Diukur dengan Tes Internasional



Hambatan/ Kendala

- *Pemberlakuan PPKM sejak awal Juli s.d. akhir bulan Agustus, menyebabkan kegiatan dan penyerapan anggaran tertunda pelaksanaannya.*
- *Efisiensi anggaran/refocusing menyebabkan terjadi pengalihan belanja dari semula untuk program/kegiatan ke belanja penanganan Covid-19 dan tidak bisa dialihkan kembali.*



Langkah Antisipasi


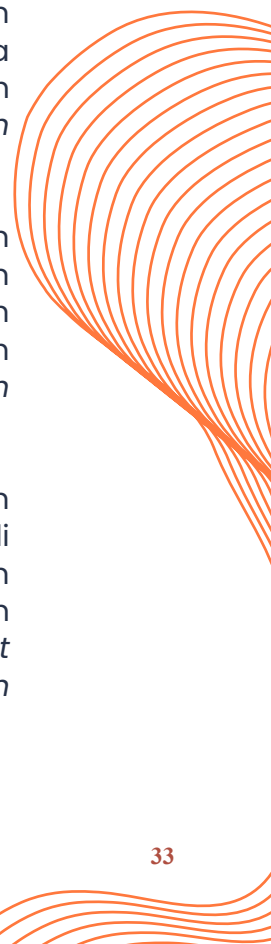
- *Penjadwalan kegiatan secara rinci melalui mekanisme kegiatan yang dilakukan secara paralel dan berkolaborasi dengan pihak eksternal.*
- *Revisi DIPA untuk pemenuhan refocusing anggaran dan penyesuaian pola kegiatan mengikuti kebijakan PPKM.*

BEBERAPA REKOMENDASI HASIL KAJIAN ISU AKTUAL



Beberapa rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan melalui kegiatan kajian isu aktual Tahun 2021 yang telah dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

- 1). Program belajar dari rumah melalui TVRI dapat ditingkatkan dengan melanjutkan penayangan Program BDR Kemendikbud, melakukan perbaikan kualitas konten dan kemasan tayangan program BDR Kemendikbud, menayangkan Program BDR Kemendikbud di media sosial, seperti YouTube agar lebih luas dan leluasa dimanfaatkan yang telah dimanfaatkan sebagai rekomendasi perbaikan program BDR melalui TVRI berikutnya (*disampaikan dalam rapat dengan Mendikbudristek*).
- 2). Inklusifitas di sekolah dapat ditingkatkan dengan meninjau kembali regulasi yang menghambat dan tidak relevan, sosialisasi dengan berbagai media komunikasi baik formal maupun informal, dan memberikan dukungan sarana yang tepat sasaran dan tepat guna (*dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan RAN HAM*).
- 3). Pelaksanaan Asesmen nasional dapat ditingkatkan dengan penyusunan soal yang bervariasi disesuaikan dengan tahap pelaksanaan AN, menghindari jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan, peningkatan kualitas server pusat untuk meningkatkan kelancaran AN di sekolah dengan moda online oleh Pusmendik, penguatan kembali pemahaman konsep dan kebijakan AN kepada pihak - pihak terkait dan orang tua siswa, penyesuaian terhadap prioritas bantuan TIK kepada sekolah, Sinkronisasi data peserta didik dilakukan tepat waktu, peningkatan koordinasi dan komunikasi antara dinas Pendidikan dengan sekolah (*dimanfaatkan sebagai rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Asesmen Nasional oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*).
- 4). Peningkatan program link and match SMK dapat dilakukan dengan menentukan perjanjian kerja sama antara SMK dengan Industri perlu disesuaikan dengan bisnis utama dan jarak antara SMK dan industri mitra, meningkatkan pelaksanaan kerja sama pada SMK yang sudah pernah melakukan kerja sama dengan industri mitra, menyusun pedoman penyelarasan kurikulum berbasis industri oleh Kemenperin dan Kemendikbudristek, mengoptimalkan pelaksanaan prakerin dan pemagangan yang selama ini telah berjalan dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia industri (*dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan program SMK Pusat Keunggulan*).

- 
- 
- 5). Pengelolaan SMK Pusat Keunggulan dapat dilakukan dengan rutusnya pelatihan guru agar terjadi perubahan mindset pembelajaran paradigma baru oleh Ditjen Vokasi dan Dinas Pendidikan, menyediakan aplikasi yang inovatif dalam mendukung proses pembelajaran dan penilaian SMK PK, mempersiapkan kurikulum baru dengan matang dan lengkap, dan menambahkan MoU dengan DU/DI sesuai kompetensi keahlian yang ada (*disampaikan sebagai bahan Monev SMK PK, Sekretariat Ditjen Vokasi*).
 - 6). Rekomendasi mengenai pengelolaan Program Guru Penggerak adalah sebagai berikut: melibatkan dari awal dinas pendidikan, peningkatan jumlah guru yang menjadi sasaran program, memberikan penghargaan bagi guru yang sudah menjadi guru penggerak, pertimbangan dalam pendekatan dan strategi pelatihan, memperkaya materi pelatihan dengan kompetensi manajerial dan pemanfaatan IT (*dimanfaatkan sebagai masukan kepada tim teknis program guru penggerak Ditjen GTK*).
 - 7). Pengelolaan dana BOS dapat ditingkatkan dengan pemberian surat edaran kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan pendampingan, penggunaan aplikasi pelaporan kegiatan dan anggaran, penyusunan SKB lintas kementerian, pelatihan berkala pengelola BOS, dan penetapan juknis dalam jangka waktu lebih lama (*dimanfaatkan sebagai rekomendasi perbaikan penyerapan dana BOS ke depan*).
 - 8). Pengelolaan BOP Kesetaraan dapat ditingkatkan dengan melakukan perhitungan besaran unit cost BOP Kesetaraan dengan mempertimbangkan IKK, dan melakukan revisi juknis berdasarkan aktivitas kegiatan lembaga dan tingkat kemahalan wilayah (*dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Dit PMPK dalam menyusun kebijakan BOP program pendidikan kesetaraan*).
 - 9). Pengelolaan candi sebagai tempat ibadah dapat ditingkatkan dengan penerbitan surat nota kesepakatan penggunaan candi sebagai tempat ibadah oleh Kemendikbudristek untuk kegiatan keagamaan dengan tetap mengikuti prosedur pelestarian (*dimanfaatkan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan Borobudur oleh Ditjen Kebudayaan dan Kementerian Agama*).

IKK #1.3 Jumlah Hasil Penjaminan Mutu

Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%			
10 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	125%	8 Dokumen	40 Dokumen	50%

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini pada tahun 2021 adalah sebesar 125%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 8 dokumen. Realisasi 10 dokumen dihasilkan dari 9 kegiatan yang terdiri dari 5 kegiatan diseminasi hasil penelitian dan 4 kegiatan fasilitasi hasil penelitian, dimana kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Penyusunan Prosiding dilaksanakan sebanyak dua tahapan.

IKK #3

Diseminasi

- 1). Penerbitan Jurnal:
 - a). Jurnal Kebijakan Pendidikan sebanyak 2 edisi
 - b). Jurnal Penelitian Kebudayaan
- 2). Diskusi Kebijakan Tematik
- 3). Penyusunan 40 Judul Policy Brief
- 4). Seminar Hasil Penelitian dan Penyusunan Prosiding Tahap I
- 5). Seminar Hasil Penelitian dan Penyusunan Prosiding Tahap II
- 6). Penyusunan 40 Judul Buku

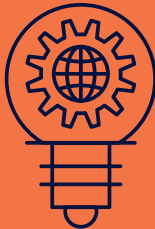
Fasilitasi

- 1). Sinkronisasi Pelaksanaan Penelitian
- 2). Sistem Informasi Penelitian
- 3). Penjaminan Mutu Penelitian
- 4). Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan



Hambatan/ Kendala

- *Pemberlakuan PPKM sejak awal Juli s.d. akhir bulan Agustus, menyebabkan kegiatan dan penyerapan anggaran tertunda pelaksanaannya.*
- *Efisiensi anggaran/refocusing menyebabkan terjadi pengalihan belanja dari semula untuk program/kegiatan ke belanja penanganan Covid-19 dan tidak bisa dialihkan kembali.*



Langkah Antisipasi

- *Penjadwalan kegiatan secara rinci melalui mekanisme kegiatan yang dilakukan secara paralel dan berkolaborasi dengan pihak eksternal.*
- *Revisi DIPA untuk pemenuhan refocusing anggaran dan penyesuaian pola kegiatan mengikuti kebijakan PPKM*

IKK #2.1 *Predikat SAKIP Satker*

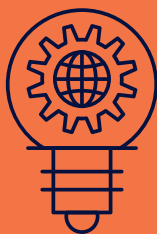
Capaian 2020	Capaian 2021		
	Target	Realisasi	%
A	A	A	100%

Puslitjak mendapatkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 81.46 sehingga masuk dalam kategori A.



Kendala/ Permasalahan

- *Tidak seluruh pegawai memahami PK pimpinan unit kerja.*
- *Perubahan tusi Puslitjak menjadi PSKP, dan penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional menyebabkan adanya kesulitan dalam koordinasi.*
- *Adanya ketidaksesuaian antara rencana aksi dengan pelaksanaan kegiatan.*



Strategi / Tindak Lanjut

- *Melakukan sosialisasi PK kepada seluruh pegawai.*
- *Melakukan Penyesuaian POS agar sesuai dengan Kepemendikbudristek No. 125/M/2021.*
- *Melakukan pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara rutin 3 bulan sekali.*

IKK #2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker

Capaian 2020	Capaian 2021		
	Target	Realisasi	%
97.14	94.53	88.73	93.86%

Nilai kinerja anggaran Puslitjak sebesar 88.73 dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1). Nilai IKPA sebesar 88.95 (bobot 40%)

Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas		Kesalahan SPM
Nilai	100	57,6	100	100	56	100	100	66,01	100	100	100	93,75	100	88,95
Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5	
Nilai Akhir	5	2,88	5	10	4,48	5	5	9,9	10	17	4,69	4,69	5	
Nilai Aspek	85,87			89				91,5			96,88			

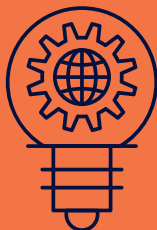
2). Nilai EKA sebesar 88.59 (bobot 60%)

Nilai EKA (SMART)				
Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
96,28	95,54	100	5,68	88,59



Kendala/ Permasalahan

- Adanya ketidaksesuaian antara perencanaan penyerapan dengan pelaksanaan anggaran.
- Adanya keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan.
- Seringnya revisi Dipa karena kebijakan refocusing menyebabkan perlunya beberapa kali penyesuaian di tingkat satker.



Strategi / Tindak Lanjut

- Melakukan revisi perencanaan penyerapan anggaran pada Halaman III DIPA.
- Menyampaikan pertanggungjawaban Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan secara parsial untuk mengurangi jumlah keterlambatan.
- Menentukan prioritas kegiatan sejak awal untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran.

2. Transisi ke Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Semenjak Bulan Agustus Tahun 2021, Puslitjak mendapatkan tugas tambahan dalam rangkaian transisi Puslitjak menjadi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Beberapa tugas yang sudah dilaksanakan selama masa transisi ini adalah penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Evaluasi Program Sekolah Penggerak dan Evaluasi Sistem Pendidikan.

Penyusunan SNP

Penyusunan Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SNP Pauddasmen) tahun 2021 terdiri dari 4 standar, yakni:

- 1). Standar Kompetensi Lulusan dan Standar
- 2). Standar Isi;
- 3). Standar Proses; dan
- 4). Standar Penilaian.

Proses penyusunan SNP secara garis besar terdiri dari: 1) Brainstorming & Penyusunan Kerangka SNP Pauddasmen; 2) Penyusunan Nasmik dan Draf Standar; 3) Penyelarasan (antar standar, peraturan terkait, kebijakan); 4) Penyampaian Draf Standar kepada Tim Pengarah; 5) Revisi 1; 6) Uji Publik untuk 5 Draf Standar; 7) Uji Publik untuk Standar Isi (Ruang Lingkup Materi) pada setiap pelajaran; 8) Revisi 2; 9) Penyusunan Draf RPM; dan 10) Penyampaian Draf RPM kepada Tim Pengarah (Eselon satu dan dua terkait). Hasil yang diperoleh dari proses yang telah

dilakukan tersebut terdiri dari satu naskah akademik dan empat draf rancangan peraturan menteri (RPM). Keempat draf RPM tersebut adalah:

- 1). Draft RPM Standar Kompetensi Lulusan
- 2). Draft RPM Standar Isi;
- 3). Draft RPM Standar Proses; dan
- 4). Draft RPM Standar Penilaian.

Sementara itu, untuk penyusunan SN Dikti terdiri dari: perumusan pasal per pasal sebagai usulan perubahan SN Dikti, penjelasan pasal per pasal (*explanatory notes*), dan kajian akademik sebagai data dukung urgensi perlunya penyusunan SN Dikti. Draft rumusan SN Dikti tersebut dilaksanakan melalui pembahasan di tingkat Tim Penyusun yang susunan timnya ditetapkan dengan SK Kepala BSKAP. Tim Penyusun melibatkan unsur Kemendikbudristek, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perwakilan profesional, dan lembaga mitra Kemendikbudristek.

Draf rumusan SN Dikti yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun selanjutnya dibahas dengan para pakar, praktisi, dan pengguna lulusan pendidikan tinggi yang meliputi unsur asosiasi profesi, asosiasi perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi keagamaan, KADIN, dll. Tahapan berikutnya yaitu uji publik yang bertujuan untuk mengetahui keterbacaan (*readability*), keberterimaan (*acceptability*), dan penerapan (*implementability*), terutama dengan sasaran para pengguna SN Dikti di perguruan tinggi. Draft SN Dikti yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dengan Tim Pengarah, yakni: Dirjen Dikti, Dirjen Diksi, Kepala BSKAP, SKM, SAM Regulasi, dan para pejabat terkait lainnya di Kemendikbudristek. Hasil akhir yang telah diperoleh yaitu:

- 1). Rancangan Permendikbudristek SN Dikti; Penjelasan pasal per pasal, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan
- 2). Permendikbud SN Dikti;
- 3). Kajian akademik SN Dikti

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam penyusunan standar nasional tersebut, hanya

kendala pandemi dan waktu yang sangat singkat. Kendala pandemi mengakibatkan tidak semua anggota tim dapat menghadiri rangkaian diskusi penyusunan. Tindak lanjut yang dilakukan yakni dengan melakukan kegiatan dengan model *hybrid* (campuran antara luring dan daring). Adapun kendala waktu yang singkat dalam penyusunan standar, tindak lanjutnya yakni dengan pertemuan secara maraton dan penugasan.

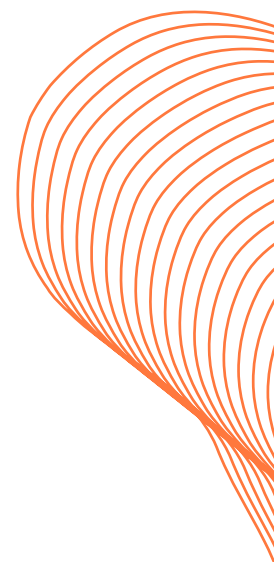
Evaluasi Program Sekolah Penggerak

Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilakukan dalam tiga jenis evaluasi yaitu,

1). Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak ditujukan untuk mengukur keberhasilan suatu program dengan membandingkan satu titik masa ke titik masa berikutnya antara sekolah yang diberikan intervensi dengan sekolah non intervensi dengan karakteristik yang relatif setara. Untuk mengukur evaluasi dampak dilakukan dengan metode *different in different* (DID).

Hasil evaluasi dampak menunjukkan bahwa terdapat kualitas satuan pendidikan yang beragam pada tahap awal sebelum intervensi program. Kualitas diukur berdasarkan sejumlah indikator yang terdapat dalam Survei Lingkungan Belajar (SLB), data Asesmen Nasional (AN) siswa dan kondisi satuan pendidikan melalui data Dapodik.



2). Evaluasi Implementasi

Evaluasi implementasi merupakan evaluasi yang ditujukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, evaluasi ini juga ditujukan sebagai bentuk mitigasi risiko yang mungkin timbul untuk mencegah terjadinya kegagalan program. Proses pengukuran evaluasi implementasi dilakukan melalui survei daring (online) dan wawancara singkat serta observasi. Survei implementasi menghasilkan sejumlah perbaikan program mulai dari proses sosialisasi, seleksi kepala sekolah, pelatihan, bimtek dan pendampingan Pemda oleh UPT.

3). Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan

Evaluasi proses dan konteks perubahan ditujukan untuk melihat proses perubahan dan konteks yang melatarbelakangi perubahan. Evaluasi proses dan konteks perubahan diukur melalui studi mendalam dengan menggunakan metode etnografi.

Evaluasi proses dan konteks perubahan, studi ini memetakan sejumlah pola di mana sekolah dapat melakukan adaptasi program dengan cepat misalnya dominasi dukungan yayasan pada program menjadi penentu keberhasilan program pada sekolah swasta dan kepala sekolah yang memiliki kemampuan kolaboratif lebih unggul dibandingkan kepala sekolah yang memiliki kemampuan kognitif.

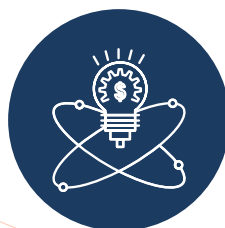
Seluruh hasil dari evaluasi ini telah diimplementasikan ke dalam perbaikan yang dilakukan oleh Ditjen PAUD DASMEN, Ditjen GTK dan BSKAP melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Metode advokasi telah dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pertemuan berkala yang terjadi secara organik untuk mengevaluasi langkah intervensi. Pertemuan





dilakukan secara virtual untuk memperbaiki program secara berkala. Kedua, pertemuan rutin setiap hari selasa yang dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon I dan II sebagai media dalam pengambilan kebijakan strategis yang bersifat high level. Ketiga, melalui proses refleksi bersama berdasarkan hasil dari hasil penelitian dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat teknis terkait.

Dalam melaksanakan Evaluasi Program Sekolah Penggerak terdapat sejumlah hambatan yaitu, Pada proses Evaluasi Dampak, sumber data yang dibutuhkan berasal dari lintas satuan kerja sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sementara pada proses Evaluasi Implementasi Program, kendala yang dihadapi adalah adanya tuntutan evaluasi program di luar dari yang telah direncanakan dan kebutuhan untuk mendesain program berdasarkan hasil evaluasi. Akibatnya terjadi bias dalam tim evaluasi karena selain mengukur evaluasi, tim juga harus menyusun sejumlah desain program terkait seperti penyusunan substansi digitalisasi seleksi kepala sekolah, penyusunan indikator pendampingan UPT pada Pemda, penyusunan indikator keberhasilan pelatih ahli, dan penyusunan mekanisme sharing responsibility dengan pemerintah daerah. Dalam proses Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan, kendala yang dihadapi adalah adanya ketidaksesuaian pendamping ahli dengan kebutuhan program. Saat ini pendamping ahli belum dapat memenuhi kebutuhan program baik dari segi waktu maupun substansi.

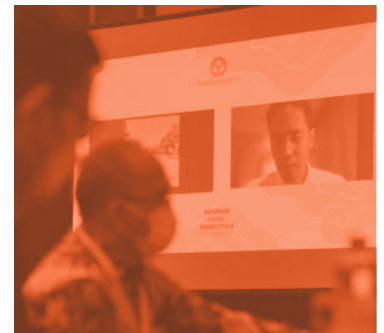


Evaluasi Sistem Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan berkaitan dengan evaluasi sistem pendidikan, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1). Penyiapan Naskah Akademik RPM Evaluasi Sistem Pendidikan
- 2). Penyiapan Draf RPM Evaluasi Sistem Pendidikan
- 3). Perubahan Permendikbud tentang SPM, penyelarasan Permendikbud SPM bidang Pendidikan dengan indikator dalam Profil Pendidikan
- 4). Harmonisasi Permendikbud tentang SPM Pendidikan dengan Kemenkumham dan Kemendagri
- 5). Penyelarasan Permendagri 100 tentang SPM
- 6). Finalisasi Draf RPM Evaluasi Sistem Pendidikan
- 7). Penyiapan draf POS Pengembangan Profil dan Rapor Pendidikan sebagai turunan dari RPM Evaluasi Sistem Pendidikan
- 8). Sosialisasi Profil Pendidikan ke Kementerian Agama, penyelarasan indikator mutu dari tim Kemendagri dan Kemendikbudristek
- 9). Penyiapan Materi Perencanaan Berbasis Data-Bahan Paparan dan Modul
- 10). Sosialisasi Materi Perencanaan Berbasis Data (difasilitasi oleh Direktorat SD):
 - a). Bimtek Pelatih Nasional
 - b). Bimtek UPT SMK (PT)
 - c). Bimtek UPT Daerah

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Evaluasi Sistem Pendidikan adalah dalam masa peralihan Puslitjak menjadi PSKP, PSKP masih menjalankan tugas sebagai lembaga penelitian, di mana masih terdapat rangkaian kegiatan penelitian yang harus diselesaikan. Keterbatasan SDM dan waktu menjadi kendala utama, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan kerja sama yang baik antara SDM yang tersedia dengan para stakeholder dalam waktu yang sangat singkat.





3. Realisasi anggaran

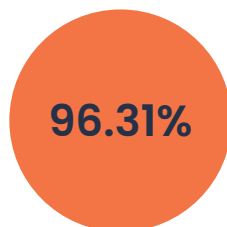
Pagu anggaran Pusat Penelitian Kebijakan dalam DIPA tahun 2021 adalah sebesar:

Rp 48,500,754,000

Dari pagu anggaran tersebut, berhasil direalisasikan sebesar:

Rp 46,711,585,640

Dengan persentase daya serap sebesar:

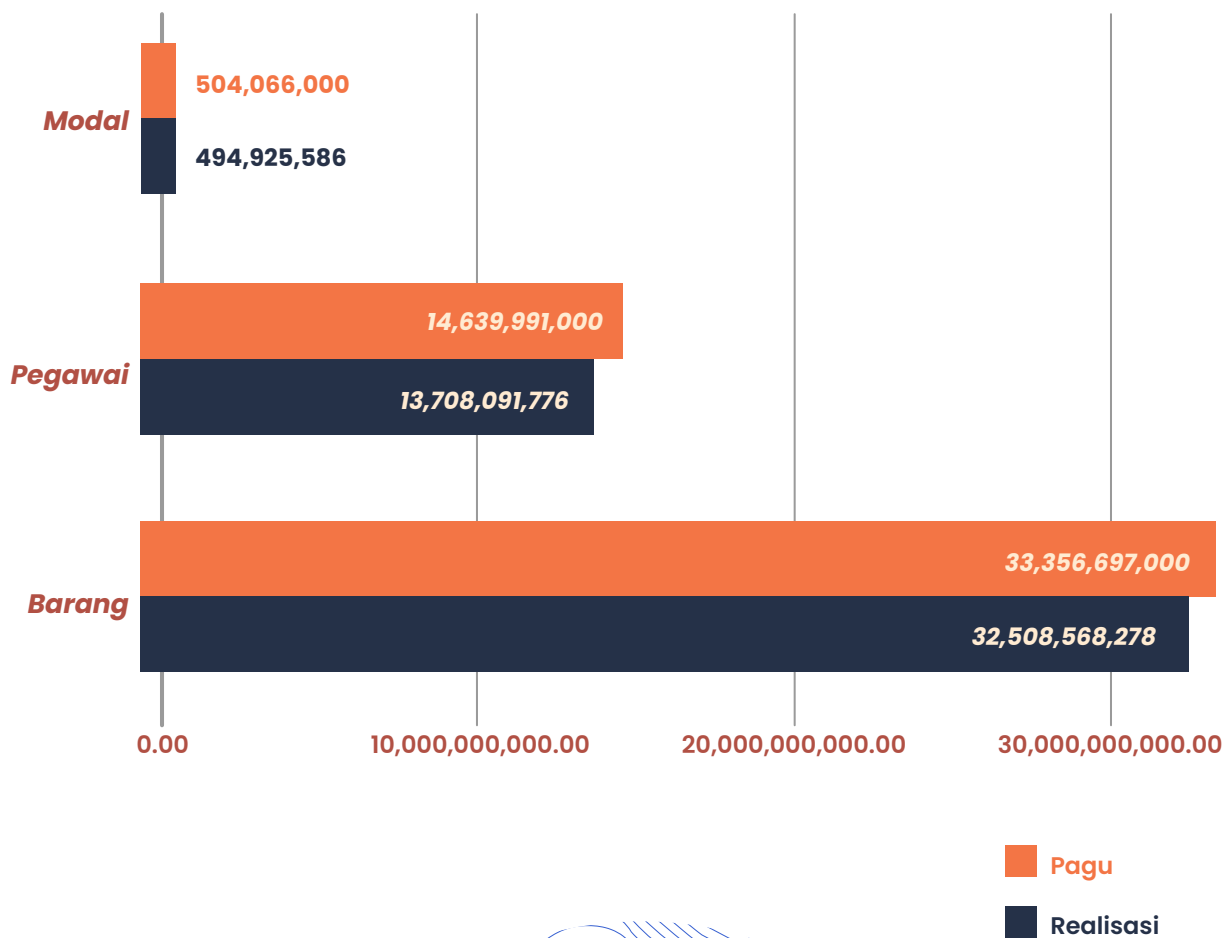


Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian satu Sasaran Kegiatan dengan tiga Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ini rincian penyerapan anggaran pada masing-masing indikator kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI 2021		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	TERSEDINYA HASIL PENELITIAN YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN SEBAGAI ACUAN DALAM Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	18	Laporan penelitian	35	194,4%	27.162.920.000	17,969,664,000	17,695,172,078	98.47%
		2	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	20	Laporan penelitian	22	110%	3.549.003.000	4,469,630,000	4,455,781,668	99.69%
		3	Jumlah hasil penjaminan mutu	8	Dokumen	10	125%	4.911.839.000	7,064,742,000	6,702,525,594	94.87%

NO	OUTPUT	TARGET 2020		REALISASI 2021		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	Kajian Isu Aktual	20	Naskah Kebijakan	22	110%	3.549.003.000	4,469,630,000	4,455,781,668	99.69%
2	Hasil Penelitian Kebijakan Terfasilitasi dan Terdiseminasi	8	Dokumen	10	125%	4.911.839.00	7,064,742,000	6,702,525,594	94.87%
3	Pelaksanaan Penelitian Terapan	35	Laporan	35	100%	27.162.920.000	17,969,664,000	17,695,172,078	98.47%
4	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100%	7.939.991.000	17,031,257,000	16,023,130,196	94.08%
5	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	1	100%	1.007.221.000	1,603,921,000	1,474,085,768	91.91%
6	Layanan Sarana Internal	69	unit	1	100%	308.000.000	361,540,000	360,890,336	99.82%

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja



Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021, Pusat Penelitian Kebijakan berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan nilai efisiensi anggaran sebesar:



27.91%

Efisiensi tersebut dihasilkan dari penghematan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dengan komposisi anggaran yang diturunkan, seluruh target dan kualitas output tetap dapat direalisasikan.

Adanya sisa anggaran sebanyak **3.69%**

atau sebesar **Rp1,789,168,360**
berasal dari

Belanja Pegawai sebesar **Rp931,899,224**

Belanja Barang sebesar **Rp848,128,722**

dan Belanja Modal sebesar **Rp9,140,414**

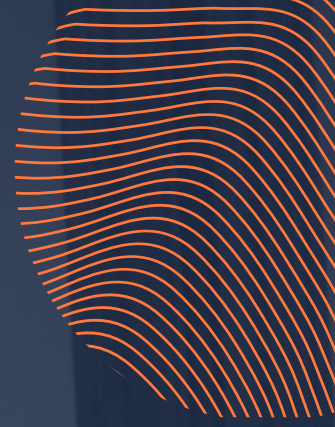
Sisa anggaran yang berasal dari Belanja Barang disebabkan oleh ketersediaan waktu untuk melakukan pencetakan buku tidak mencukupi, sedangkan sisa anggaran yang berasal dari Belanja Pegawai disebabkan oleh tunjangan KPA yang tidak dapat dibayarkan karena Kapuslitjak masih dijabat oleh pelaksana tugas (plt.) dan adanya selisih dari tunjangan dan uang makan pegawai.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, HIBURAN, RISET, DAN KEMASYARAKATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR
ANDARASARI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR



A group of approximately ten people are gathered in a meeting room. They are dressed in professional attire, including batik shirts and a hijab. Several individuals are wearing face masks. Some people have their hands raised in the air, suggesting an interactive session or a Q&A period. The room features a whiteboard with some papers pinned to it in the background. The overall atmosphere appears to be one of a formal yet engaged meeting.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

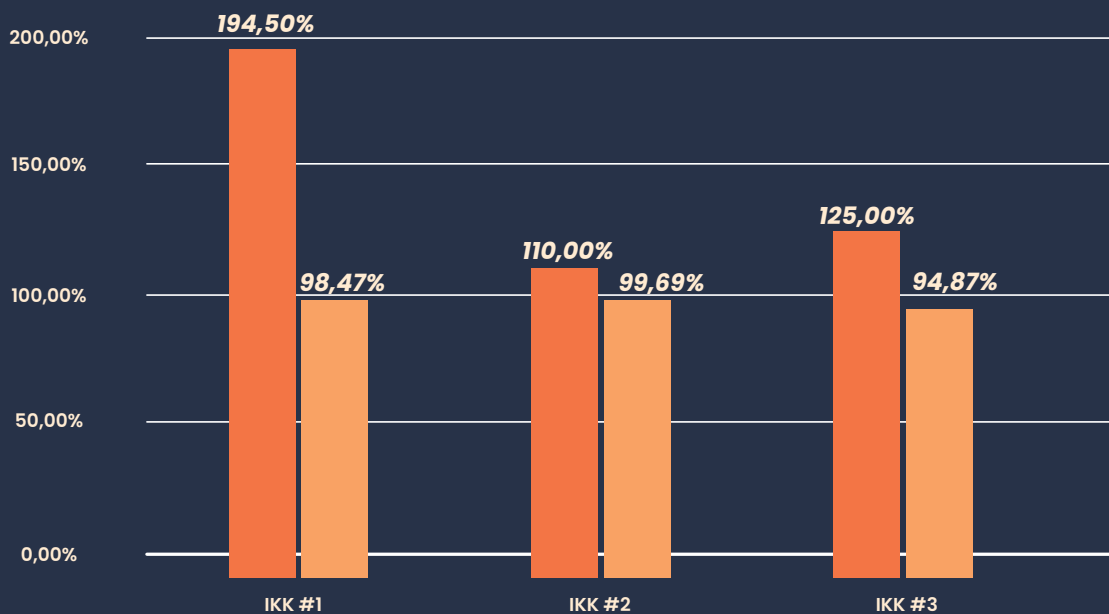
1. Kesimpulan

Selama tahun 2021, Puslitjak berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Proporsi Persentase Pencapaian IKK Tahun 2021



Perbandingan Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik per IKK Tahun 2021





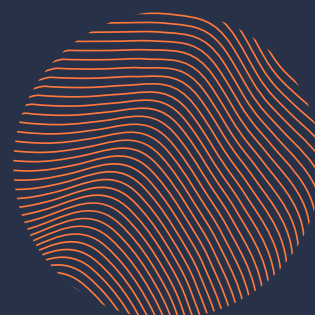
- Laporan Kinerja Puslitjak Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 (visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan program) serta tugas pokok dan fungsi kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama tahun 2021.
- Target IKK Tahun 2021 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 secara umum dapat terealisasi. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2021 telah berhasil merealisasikan IKK beserta target output kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Balitbang dan Perbukuan yang dituangkan dalam Renstra Balitbang dan Perbukuan 2020-2024.
- Dalam kaitandenganketercapaianmisi,Puslitjak telah melaksanakan program penelitian dan pengembangan dengan menitikberatkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan.
- Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun ini, merupakan dasar berpijak yang kuat bagi Puslitjak untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.



2. Rekomendasi

Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:

- Peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program kegiatan penelitian dan pengembangan antar instansi dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan.
- Menyelesaikan dengan segera permasalahan yang menghambat kegiatan penelitian, di antaranya penanganan koordinasi, perencanaan pendanaan, dan perencanaan waktu yang lebih baik.
- Terus meningkatkan disiplin, tata kerja, kerja sama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja.
- Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.





LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Puslitjak Tahun 2021 – Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan
Dengan
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Totok Suprayitno

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 08 Februari 2021

**Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Perbukuan**



Totok Suprayitno

Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan



Irsyad Zamjani



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	20
		[IKK 1.2] Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	20
		[IKK 1.3] Jumlah hasil penjaminan mutu	8
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Satker	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker	94,53

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud	Rp. 21.534.304.000
2	5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan	Rp. 35.623.762.000
		TOTAL	Rp. 57.158.066.000

Jakarta, 08 Februari 2021

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan



Totok Suprayitno

Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan



Irsyad Zamjani

2. Perjanjian Kinerja Puslitjak Tahun 2021 – Revisi



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Anindito Aditomo

Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 13 Desember 2021

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan**

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan**



Anindito Aditomo



Irsyad Zamjani

Target Kinerja



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	18
		[IKK 1.2] Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	20
		[IKK 1.3] Jumlah hasil penjaminan mutu	8
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Satker	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker	94.53

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud	Rp. 18.996.718.000
2	5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan	Rp. 29.425.481.000
		TOTAL	Rp. 48.422.199.000

Jakarta, 13 Desember 2021

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan**



Anindito Aditomo

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan**



Irsyad Zamjani

3. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI 2021		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	TERSEDINYA HASIL PENELITIAN YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN SEBAGAI ACUAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	18	Laporan penelitian	35	194,4%	27.162.920.000	17,969,664,000	17,695,172,078	98.47%
		2	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	20	Laporan penelitian	22	110%	3.549.003.000	4,469,630,000	4,455,781,668	99.69%
		3	Jumlah hasil penjaminan mutu	8	Dokumen	10	125%	4.911.839.000	7,064,742,000	6,702,525,594	94.87%

NO	OUTPUT	TARGET 2020		REALISASI 2021		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
1	Kajian Isu Aktual	20	Naskah Kebijakan	22	110%	3.549.003.000	4,469,630,000	4,455,781,668	99.69%
2	Hasil Penelitian Kebijakan Terfasilitasi dan Terdiseminasi	8	Dokumen	10	125%	4.911.839.000	7,064,742,000	6,702,525,594	94.87%
3	Pelaksanaan Penelitian Terapan	35	Laporan	35	100%	27.162.920.000	17,969,664,000	17,695,172,078	98.47%
4	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100%	7.939.991.000	17,031,257,000	16,023,130,196	94.08%
5	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	1	100%	1.007.221.000	1,603,921,000	1,474,085,768	91.91%
6	Layanan Sarana Internal	69	unit	1	100%	308.000.000	361,540,000	360,890,336	99.82%

4. Pernyataan Reviu Laporan Kinerja



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244
Laman <http://litbang.kemdikbud.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Penelitian Kebijakan untuk tahun Anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pusat Penelitian Kebijakan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

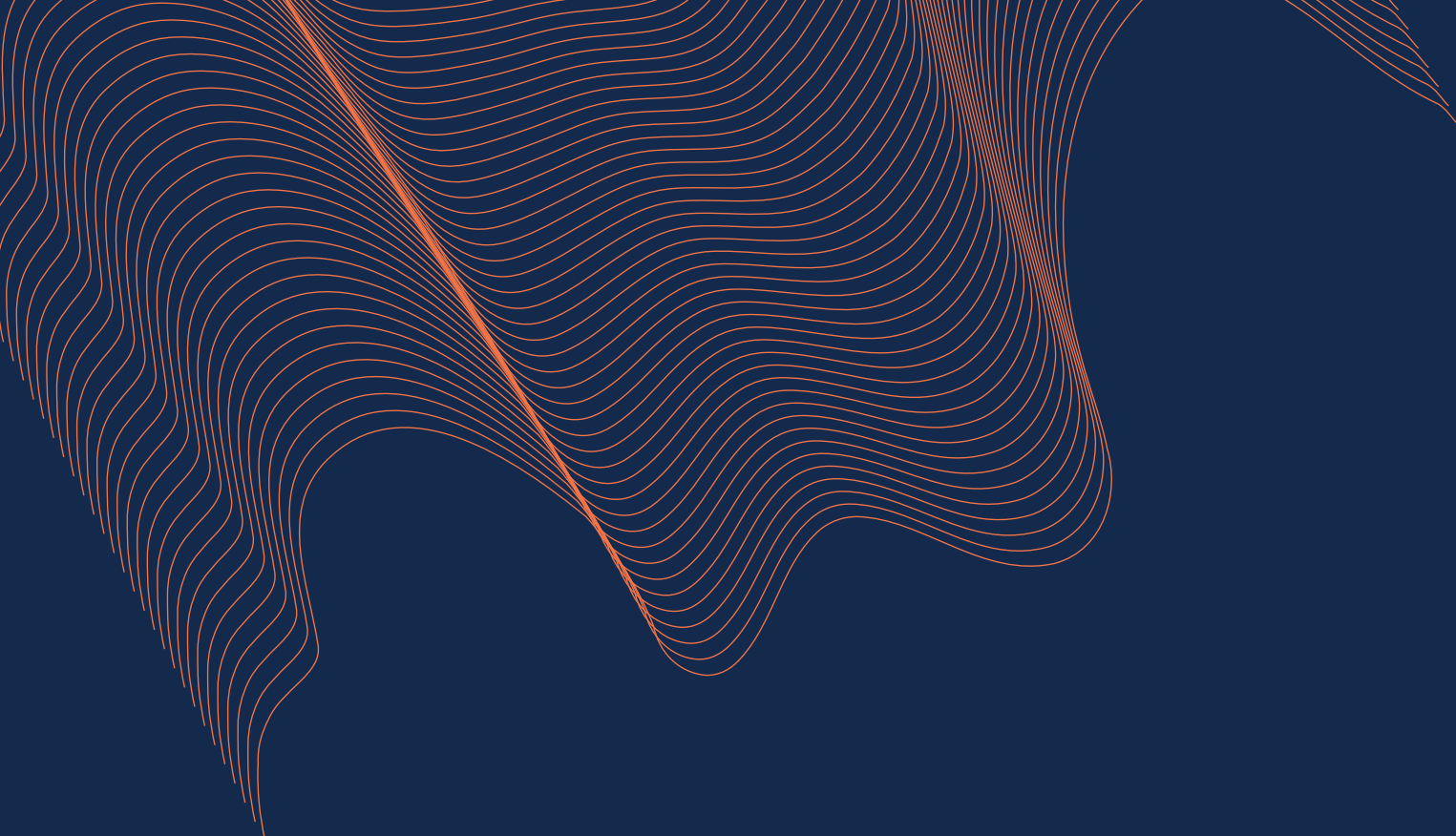
Jakarta, 26 Januari 2022

PAMA KETUA TIM PEREVIU




Andry Rihardika

NIP 198408172009121003




Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E Lantai 19 - Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270

 puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/

 puslitjakbud@kemdikbud.go.id

 [puslitjak.kemdikbud](https://www.instagram.com/puslitjak.kemdikbud)

 021 - 5713827

